

Sarah Setianingsih, Leli Yulifar

POTENSI KEMARITIMAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI ASPEK SOSIO-BUDAYA EKONOMI (2012-2024)

-  Artikel
-  Sejarah 1
-  Universitas Galuh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3127530230

Submission Date

Jan 11, 2025, 7:25 AM UTC

Download Date

Jan 11, 2025, 7:32 AM UTC

File Name

17694-63312-1-SM.docx

File Size

399.5 KB

10 Pages

5,024 Words

35,818 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
 - ▶ Quoted Text
-

Top Sources

- 26%  Internet sources
 - 9%  Publications
 - 0%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 26% Internet sources
- 9% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	peraturan.bpk.go.id	2%
2	Internet	www.coursehero.com	2%
3	Internet	bappeda.jabarprov.go.id	2%
4	Internet	repository.ub.ac.id	1%
5	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
6	Internet	docplayer.info	1%
7	Internet	humaspangandarankab.blogspot.com	1%
8	Internet	www.slideshare.net	1%
9	Internet	gelarpangestu.blogspot.com	1%
9	Internet	jurnal.unigal.ac.id	1%
11	Internet	ojs.unida.ac.id	<1%

12	Internet	melleq.com	<1%
13	Internet	journal.amikveteran.ac.id	<1%
14	Publication	Rasyid Nur Ramadhan, Ahmal Ahmal, Asyrul Fikri. "Dinamika Kehidupan Sosial Ek..."	<1%
15	Internet	www.researchgate.net	<1%
16	Internet	repository.upi.edu	<1%
17	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
18	Internet	nurwiddy.wordpress.com	<1%
19	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
20	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
21	Internet	123dok.com	<1%
22	Internet	download.garuda.kemdikbud.go.id	<1%
23	Internet	www.pangandaranlife.com	<1%
24	Internet	www.scribd.com	<1%
25	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%

26	Internet	carapengolahan.blogspot.com	<1%
27	Internet	hafiza9308.blogspot.com	<1%
28	Internet	dev.pangandarankab.go.id	<1%
29	Internet	doku.pub	<1%
30	Internet	digilib.isi.ac.id	<1%
31	Internet	abhiseva.id	<1%
32	Internet	repositorio.ug.edu.ec	<1%
33	Internet	geograf.id	<1%
34	Internet	isi-ska.ac.id	<1%
35	Internet	majalah.tempo.co	<1%
36	Internet	pt.scribd.com	<1%
37	Internet	revistahegemonia.emnuvens.com.br	<1%
38	Publication	Mukhlisah Mukhlisah, Ni'matus Sholihah. "Implementation of The Cambridge I...	<1%
39	Internet	akbarhamdan.wordpress.com	<1%

40	Internet	beritajatim.com	<1%
41	Internet	dalamislam.com	<1%
42	Internet	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%
43	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
44	Internet	es.scribd.com	<1%
45	Internet	id.scribd.com	<1%
46	Internet	jdih.tasikmalayakota.go.id	<1%
47	Internet	karyabangping.blogspot.com	<1%
48	Internet	soaltescpns2018.blogspot.com	<1%
49	Internet	sulsel.pojoksatu.id	<1%
50	Internet	www.govserv.org	<1%
51	Internet	journal.feb.unmul.ac.id	<1%
52	Publication	Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal P...	<1%
53	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%

54	Internet	journal.uad.ac.id	<1%
55	Internet	tempatwisataseru.com	<1%
56	Internet	www.jogloabang.com	<1%
57	Publication	Riza Saepul Millah, Siti Fadlina. "Analisis Daya Dukung (Carrying Capacity) dalam ...	<1%
58	Internet	mansurasyarie.wordpress.com	<1%



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>

POTENSI KEMARITIMAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI ASPEK SOSIO-BUDAYA EKONOMI (2012-2024)

Sarah Setianingsih¹, Leli Yulifar¹

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia¹

E-mail: sarahsetianingsih@upi.edu

Sejarah Artikel: Diterima 7-7-2020 Disetujui 1-8-2020 Dipublikasikan 1-9-2020

Abstrak

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru yang terbentuk pada tahun 2012. Pembentukan Daerah Otonomi Baru ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk maju dan berkembang dalam berbagai aspek. Kabupaten Pangandaran sendiri dinilai mampu menjadi suatu Daerah Otonomi Baru salah satunya karena potensi Kabupaten Pangandaran itu sendiri, terutama dalam bidang ekonomi. Walaupun memiliki potensi yang besar, pada awalnya sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran mengalami berbagai tantangan. Kabupaten pangandaran harus melakukan penyusunan perangkat daerah, pengelolaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah maritim yang memiliki potensi besar dalam bidang kemaritiman aspek sosio-budaya dan ekonomi. Artikel ini menjelaskan kondisi sosial-budaya ekonomi Kabupaten Pangandaran semenjak menjadi daerah otonomi baru. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Pangandaran tidak hanya sektor pariwisata, melainkan banyak potensi-potensi lain yang harus diperhatikan, dikelola, dimanfaatkan, dan dijaga dengan baik untuk menunjang kesejahteraan Kabupaten Pangandaran. Dengan potensi kemaritiman yang ada dan pengelolaan yang tepat, hal tersebut diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran, Potensi Kemaritiman

Abstract

Pangandaran Regency is a New Autonomous Region formed in 2012. The formation of this New Autonomous Region was motivated by the desire of the community to progress and develop in various aspects. Pangandaran Regency itself is considered capable of becoming a New Autonomous Region, one of which is because of the potential of Pangandaran Regency itself, especially in the economic sector. Although it has great potential, initially as a New Autonomous Region, Pangandaran Regency experienced various challenges. Pangandaran Regency must compile regional apparatus, manage budgets for infrastructure development, public services, improve the quality of education, health, and so on. Pangandaran Regency is one of the maritime areas that has great potential in the maritime sector, socio-cultural, and economic aspects. This article also explains the socio-cultural economic conditions of Pangandaran Regency since it became a new autonomous region. Therefore, this article aims to show that the tourism potential of Pangandaran Regency is not only sectoral, but there are many other potentials that must be considered, managed, utilized, and maintained properly to support the welfare of Pangandaran Regency. With the existing maritime potential and proper management, it is hoped that this will improve the welfare of the people of Pangandaran Regency.

Keyword: *New Autonomous Region, Pangandaran Regency, Maritime Potential*

PENDAHULUAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah maritim yang terletak di Jawa Barat. Awalnya Pangandaran merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang kemudian mengalami pemekaran dan ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 25 Oktober 2012. Hal tersebut pada selanjutnya diatur oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012. Pemekaran ini didorong oleh aspirasi masyarakat Pangandaran untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan dalam ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran ", 2012), Kabupaten Pangandaran resmi dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB) karena adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang memandang perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta melihat tingkat kesejahteraan dan beban tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, pembentukan Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah guna pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai sebuah Kabupaten, Pangandaran memiliki potensi yang besar terutama potensi maritim di bidang pariwisata bahari. Hal ini dicanangkan dalam visi Kabupaten Pangandaran, yaitu "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia".

Maritim sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan laut meliputi sumber daya, ekosistem, berbagai aktivitas seperti perikanan laut, batas laut, wisata bahari, industri laut, dsb. (Basri, 2023) mendefinisikan negara maritim yang sesuai untuk Indonesia adalah sebuah negara yang mampu membangun kekuatan maritim (*seapower*) dalam bidang pelayaran dan perdagangan (*merchant fighting instruments*), serta kemajuan teknologi kemaritiman (*maritime technology*) untuk secara sinergis memanfaatkan potensi yang laut dan darat dalam kerangka dinamika geopolitik demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sumber daya pada sektor kelautan sangatlah besar. Hal ini seharusnya bisa menjadi input produksi bernilai guna agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan definisi kemaritiman merupakan segala kegiatan yang tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya laut dan warisan budaya saja, namun juga terkait dengan kepentingan-kepentingan lainnya, seperti

perdagangan, teknologi pertahanan dan sebagainya yang ikut berperan dalam sektor maritim (Basri, 2023). Dengan demikian, potensi kemaritiman harus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, potensi Kabupaten Pangandaran jelas tidak hanya dalam bidang pariwisata saja. Pariwisata merupakan salah satu bagian dari potensi Kabupaten Pangandaran. Namun lebih dari itu, sebagai wilayah maritim Pangandaran memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi, dan sosio-budaya. Menurut (Basri, 2023) Potensi ekonomi dan perdagangan maritim dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, terutama sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi lepas laut, kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran, dan pariwisata. Selain dalam sektor ekonomi, Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi maritim yang besar dari aspek sosio-budaya. Budaya masyarakat maritim juga menjadi salah satu potensi besar yang mendorong kemajuan Kabupaten Pangandaran. Budaya maritim merupakan hubungan manusia dan laut yang mempengaruhi berbagai aspek. Dengan potensi wisata yang besar, Pangandaran banyak didatangi wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara, hal ini menimbulkan akulturasi budaya, interaksi sosial dan berbagai organisasi sosial di lingkungan masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Kabupaten Pangandaran, seperti Skripsi karya (Nugraha, 2017) yang berjudul "Persepsi dan Ekspektasi Masyarakat tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran", skripsi tersebut membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat, dampak setelah Kabupaten Pangandaran menjadi DOB, ekspektasi masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi DOB, dan realisasinya. Penelitian selanjutnya oleh (Sahara, 2024) yang berjudul "Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020" yang didalamnya mengkaji tentang perkembangan, pengelolaan, tantangan dan potensi untuk perencanaan strategis masa depan.

Kebaruan penelitian ini yakni membahas dari segi potensi maritim Kabupaten Pangandaran, tidak hanya dalam bidang pariwisata saja, namun juga terkait ekonomi dan sosial-budaya. Manfaatnya untuk menimbulkan kesadaran akan potensi maritim yang ada di Kabupaten Pangandaran. Agar potensi tersebut nantinya bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah menjelaskan secara historis latar belakang terbentuknya Kabupaten Pangandaran menjadi

Daerah Otonomi Baru (DOB) dan potensi maritim Kabupaten Pangandaran yang mempengaruhi keadaan sosial-budaya ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan kerangka sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, dimana terdapat beberapa prosedur dalam melakukan penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam (Abdurahman, 2011) metode penelitian sejarah ialah seperangkat kaidah dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, melakukan penilaian secara kritis, serta mengajukan penggabungan dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Tahapan metode sejarah terdiri dari heuristik, yang merupakan kegiatan mencari sumber-sumber, data penelitian, berbagai referensi yang sesuai dengan fokus yang dikaji. Dalam hal ini penulis mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan landasan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, kemaritiman, potensi Kabupaten Pangandaran, dan data statistik ekonomi, sosial budaya Kabupaten Pangandaran. Kemudian setelah itu dilakukan kritik sumber untuk melihat, menilai, menganalisis sumber yang telah diperoleh. Kritik ini terbagi menjadi kritik eksternal yang merupakan pengujian keaslian sumber dan kritik internal yang ditujukan untuk menguji kredibilitas sumber. Hal ini ditujukan agar sumber yang dipilih sesuai dengan fakta yang akan digunakan dalam pengkajian terkait potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran dari aspek sosio-budaya ekonomi. Selanjutnya interpretasi yang merupakan kegiatan untuk mencari keterhubungan fakta untuk memahami makna yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis mencoba menginterpretasikan dan menghubungkan fakta-fakta dan data dari sumber yang diperoleh terkait Kabupaten Pangandaran, data statistik sosial budaya ekonomi, kemaritiman, dan lain sebagainya. Setelah itu historiografi atau penulisan sejarah, historiografi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian sejarah, dalam historiografi hasil penelitian disusun sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Pada tahapan ini penulis menguraikan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta yang telah ditemukan menjadi sebuah artikel yang berjudul "Potensi Kemaritiman Kabupaten Pangandaran dari Aspek Sosio-Budaya Ekonomi (2012-2024)".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kabupaten Pangandaran Menjadi Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Pangandaran diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012. Pangandaran sendiri berasal dari nama salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Pembentukan Kabupaten Pangandaran ini telah melalui proses yang panjang. Wacana tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran telah muncul sejak lama, namun kemudian muncul kembali setelah terjadinya tsunami di pantai Pangandaran pada tahun 2006. Tsunami menerjang Pangandaran yang berada di kawasan pantai terjadi pada hari Senin 17 Juli 2006. Gempa yang berpusat pada kedalaman 33 KM ini disertai lima kali gempa susulan pada sore hari yang berkisar antar 5 sampai dengan 7 skala richter. Sejak peristiwa tersebut masyarakat kembali memperjuangkan untuk pembentukan DOB yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya keinginan untuk :

- 1) Mendekatkan layanan publik
- 2) Mengelola potensi daerah yang belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Ciamis
- 3) Membuka lapangan pekerjaan
- 4) Mensejahterakan masyarakat
- 5) Melakukan penataan wilayah
- 6) Meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan ("Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39. A Tahun 2016 tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat," 2016).

Perkembangan wilayah atau pemekaran biasanya terjadi karena masyarakat di daerah tersebut ingin maju dan berkembang dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, yang dilihat dari segi geografis. Perkembangan daerah ini menjadi dasar pembentukan wilayah otonom baru dari daerah asalnya. (Nugraha, 2017). Perjuangan untuk membentuk DOB ini diawali oleh pergerakan beberapa organisasi masyarakat yang kemudian bergabung untuk menjadi suatu tim dalam Panitia Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP). Pada 10 Juli 2007 panitia tersebut kemudian berubah menjadi presidium pembentukan Kabupaten Pangandaran yang diketuai oleh H Supratman, B.Sc. Hingga pada 17 Juli 2007, H. Supratman selaku ketua presidium membacakan naskah deklarasi terkait pembentukan Kabupaten Pangandaran dihadapan ribuan masyarakat dari 10 Kecamatan di wilayah Ciamis Selatan. Naskah tersebut menyatakan tekad dari masyarakat 10 Kecamatan untuk membentuk pemerintahan Kabupaten sendiri berpisah dari Kabupaten Ciamis, hal-hal terkait Undang-Undang pemekaran akan segera diselesaikan.

Untuk lebih jelasnya, dalam ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran ", 2012) melalui beberapa tahapan, yakni:

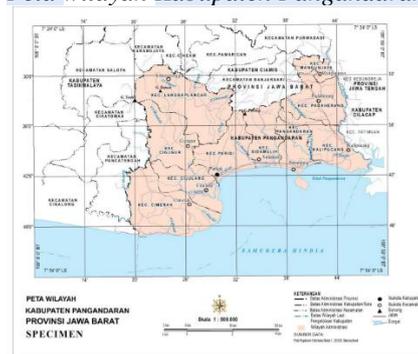
- 1) Tingkat masyarakat; terbentuknya organisasi-organisasi seperti "Munding Pakidulan, Awi Kahuripan, Paguyuban Masyarakat Pakidulan, Gabungan Anak Selatan" yang kemudian menjadi "Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran".
- 2) Tingkat Kabupaten induk dalam hal ini Kabupaten Ciamis; Setelah dibacakannya deklarasi tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran, selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen oleh wakil dari 92 Desa. Dokumen tersebut menjadi berkas yang kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis. Pada Agustus 2008 dilakukan pengkajian daerah tentang kelayakan Kabupaten Pangandaran. Sekitar tahun 2008, presidium meminta bantuan akademisi dari Unpad dan Unigal untuk melakukan pengkajian akademis pemisahan Pangandaran dari Ciamis. Hasilnya Pangandaran dinyatakan layak untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) (Nugraha, 2017). Sehingga pada 6 Februari 2009 Jeje Wiriadinata selaku ketua DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui pembentukan Kabupaten Pangandaran.
- 3) Tingkat provinsi; Setelah disetujui DPRD Kabupaten Ciamis, pembentukan Kabupaten Pangandaran diajukan kepada provinsi Jawa Barat, yang kemudian disetujui oleh DPRD Jawa Barat.
- 4) Tingkat Komisi II DPR RI (lobi politik); 2010 awal, rencana kerja Komisi II DPR RI memuat pembahasan terkait rencana pembentukan Kabupaten Pangandaran
- 5) Tingkat mendagri; DPOP, dan DPD (survey dan rekomendasi hasil kajian);
- 6) Tingkat pemerintah pusat (DPR dan Pemerintah); Pada rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Oktober 2012, rancangan Undang-Undang terkait Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Kemudian pada 16 November 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang kemudian diundangkan pada 17 November 2012.

(FIRDAUS, 2013) menilai pada masa pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, terdapat alur yang tidak sesuai

dengan alur yang sudah tertuang secara normatif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sebab, pada saat itu kelompok presidium memaksimalkan hak inisiatif DPR dalam proses penyelesaian administrasi di tingkat Provinsi induk, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pemekaran Kabupaten Pangandaran masuk pada Program Legislasi Nasional di tahun 2009, hal ini kemudian memudahkan tahapan-tahapan berikutnya. Disamping hal tersebut, setelah Kabupaten Pangandaran diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran fokus pada penyusunan perangkat daerah, hingga kemudian kepada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meskipun pada awalnya mengalami berbagai tantangan, namun pemerintah terus mengupayakan hal tersebut melalui program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Gambar 1

Peta wilayah Kabupaten Pangandaran



Sumber: (Lampiran UU RI Nomor 21 Tahun 2012)

Berdasarkan ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran ", 2012). Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan yakni, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih. Luas Kabupaten Pangandaran 168.509 ha dengan luas laut 67.340 ha, dan panjang pantai 91km. Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan :
 - Kabupaten Ciamis : Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Purwadadi
 - Kabupaten Tasikmalaya : Kecamatan Karangjaya dan Kecamatan Cineam
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan :
 - Kabupaten Tasikmalaya : Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cicalong, Kecamatan Salopa

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan :
- Kabupaten Cilacap Jawa Tengah : Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Patimuan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan :
- Laut Samudera Indonesia

Potensi Maritim dalam Bidang Sosial-Budaya Ekonomi Kabupaten Pangandaran

Pada tanggal 22 April 2013 telah dilakukan peresmian Kabupaten Pangandaran di Jakarta dengan H. Endjang Naffandi sebagai pejabat Bupati Pangandaran sesuai dengan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Presiden RI No 48/P/2013. Pada masa awal Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru, dibentuk pemerintahan untuk menyusun kebijakan sedemikian rupa yang dapat memprioritaskan pembangunan, perekonomian, dan peningkatan kualitas di berbagai aspek. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Sebagaimana disampaikan dalam (Barat, 2016) Kabupaten Pangandaran, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), tentu perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun status otonomi ini tergolong baru, Pangandaran sudah lama memiliki peran penting dan menjadi kawasan strategis di Jawa Barat. Hal ini terlihat pada kebijakan tata ruang yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Kewilayahan (PKW). Selain itu, sesuai dengan ("Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029," 2010), Pangandaran juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) di wilayah pengembangan Priangan Timur, serta menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam hal pengelolaan ekonomi. Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengembangan pariwisata di daerahnya. Diantara 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tiga diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Barat, yakni; Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan Destinasi Pangandaran (Fauzi, Bakhri, & Abdul Aziz, 2019)

Pada konteks ekonomi, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi ekonomi yang besar termasuk ekonomi maritim. Perikanan menjadi salah satu potensi yang besar bagi ekonomi maritim. Potensi perikanan ini bisa meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Bahkan lebih dari itu potensi perikanan ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sektor perikanan dalam arti yang lebih luas mencakup industri pengolahan hasil perikanan

yang nilai investasinya tak kalah besar, Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan apabila kemudian sektor perikanan menjadi salah satu spektrum ekonomi maritim yang mampu diandalkan bagi perekonomian nasional (Wahyudin, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Nugroho, Iwan, dan Danuri dalam (Putra et al., 2022) Perikanan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup bangsa. Hal ini berlaku bagi nelayan skala kecil, pembudidaya ikan, dan pelaku ekonomi di sektor perikanan yang harus tetap memperhatikan lingkungan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya. Di Kabupaten Pangandaran, sektor perikanan ini meliputi budidaya ikan, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan. Ikan menjadi sumber pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hal ini menjadi suatu modal awal potensi perikanan. Karena ikan merupakan sumber daya yang bisa diperbaharui dan bisa didayagunakan secara keberlanjutan. Masyarakat Kabupaten Pangandaran menangkap ikan dengan cara tradisional, hal ini salah satu kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan karena menjunjung tinggi nilai gotong-royong. Ikan yang telah ditangkap kemudian dijual di pelelangan ikan.

Pada industri pengelolaan hasil perikanan, di wilayah sekitar pantai di Kabupaten Pangandaran terutama di wilayah pariwisata bahari seperti pantai Pangandaran terdapat banyak restoran yang menyediakan ikan segar, seafood yang segar untuk kemudian dimasak dan bisa langsung wisatawan nikmati. Selain itu masyarakat Kabupaten Pangandaran juga memanfaatkan pengolahan ikan untuk dijadikan ikan asin, dan menjadi salah satu oleh-oleh khas Pangandaran, salah satunya ialah ikan asin jambal roti. Asin jambal roti ini merupakan olahan ikan asin yang berasal dari ikan manyung. Dalam ("website Kabupaten Pangandaran,") (<https://portal.pangandarankab.go.id/>) disebutkan bahwa pada tahun 2012, luas area pemeliharaan ikan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari 44 Ha untuk tambak, 339 Ha untuk kolam/empang, dan 18,30 Ha untuk sawah. Berdasarkan jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan, hasil di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 adalah 2.219,91 ton dari perikanan laut, 687,8 ton dari tambak, 2.767,38 ton dari kolam, dan 40 ton dari sawah. Nilai produksi ikan laut yang ditangkap oleh nelayan dan masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencapai 2.220 ton dengan nilai mencapai 43,03 miliar. Ini mencerminkan potensi perikanan yang sangat besar dan harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selain potensi dalam perikanan, Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi sangat besar dalam bidang pariwisata bahari. Pangandaran menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Jawa Barat untuk berlibur dan menikmati keindahan wisata bahari. Namun tidak hanya masyarakat Jawa Barat saja, melainkan wisatawan domestik lainnya hingga wisatawan mancanegara memanfaatkan Pangandaran sebagai salah satu wisata andalan mereka. Indonesia diakui sebagai destinasi wisata global karena memiliki keindahan bawah laut dan pantai yang menarik wisatawan. Kehadiran sektor wisata bahari di Indonesia membawa dampak positif bagi potensi ekonomi berbasis kemaritiman. Pariwisata maritim adalah konsep pariwisata yang sangat terkait dengan lingkungan laut, mencakup aktivitas di pantai, pulau, dan perairan laut, serta berbagai kegiatan rekreasi yang berkaitan dengan laut. Pariwisata ini meliputi rekreasi yang diadakan di area laut, baik di permukaan maupun di bawah air. Wisata bahari menawarkan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menyelam, berselancar, dan memancing di berbagai lokasi di laut. Pariwisata bahari memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik utama,

Aktivitas wisata bahari ini memerlukan dukungan, baik itu akses transportasi (udara, darat, dan laut) maupun industri pendukung lainnya, seperti akomodasi (hotel, *guest house*, dan lain-lain), penyediaan makanan dan minuman, termasuk ikan konsumsi yang menarik bagi wisatawan, serta souvenir. Semua aktivitas terkait wisata bahari ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berkontribusi pada peningkatan devisa negara yang penting untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam ("Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata," 2009) bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mencakup objek wisata pantai dan sungai. Banyak destinasi unggulan yang menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Contoh beberapa objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran antara lain: Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, serta wisata sungai seperti Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, dan Santirah. Dalam meningkatkan ekonomi pada aspek pariwisata, sudah saatnya masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama

yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata yang baik adalah haruslah mementingkan berbagai aspek yang ada di masyarakat bukan hanya sebatas peningkatan ekonomi semata dan pengelolaan harus berkelanjutan (Muhammad, 2015). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan yang dilakukan harus tetap mementingkan kelestarian alam. Dengan demikian pengelolaan pariwisata yang baik, dapat mendukung untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya selain meningkatkan perekonomian, pengelolaan pariwisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan.

Pada konteks sosial budaya, budaya maritim ialah hubungan antara manusia dan laut yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu pembentuk budaya maritim ialah kondisi alam maritim. Hal ini membentuk karakteristik tertentu yang berorientasi maritim seperti keberanian, kerja keras, percaya diri, ulet, gotong royong, berjiwa wirausaha, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Perbedaan kondisi alamiah kehidupan laut dan darat menimbulkan perbedaan karakteristik budaya. Simpul budaya maritim menjadikan laut sebagai ruang yang multifungsi, yaitu sebagai ruang hidup, ruang perjuangan, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolahraga, berkreasi, dan ruang mendidik masyarakat (Hanggari, Madjid, Perwita, & Wiranto, 2022). Salah satu budaya maritim Di Kabupaten Pangandaran terdapat tradisi hajat laut yang merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur nelayan dan masyarakat kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat melalui laut yang memberikan sumber penghidupan. Upacara hajat laut yang dilaksanakan dewasa ini berbeda dengan hajat laut pada mulanya. Karena upacara hajat laut saat ini telah berakulturasi dengan masyarakat setempat terutama agama Islam. Hajat laut dewasa ini merupakan perundingan antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hajat Laut harus mengandung unsur-unsur keislaman seperti pengajian, tabligh akbar, lantunan doa, dan lain-lain (Heriyawati, Herdiani, & Dimyati, 2020). Hal ini terjadi karena hajat laut dianggap sebagai kegiatan syirik yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Dahulu, tradisi Hajat Laut hanya dilakukan oleh para nelayan untuk keperluan spiritual, namun saat ini perayaan Tradisi Hajat Laut dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk masyarakat luas. Dimana perayaan tradisi ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk wisatawan dari berbagai daerah (Nuraini, Khadijah, & Radiah, 2023). Hajat laut ini bisa dijadikan suatu kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk pariwisata Kabupaten

Pangandaran yang dapat menarik banyak wisatawan.

Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan di Kabupaten Pangandaran dalam Badan Pusat Statistik (2016) jumlah wisatawan mancanegara tahun tersebut sebanyak 10.344 orang dan 1.824.367 orang wisatawan domestik.

Pada tahun 2016 Kabupaten Pangandaran mulai melakukan pemilihan kepala daerah dalam hal ini Bupati dan wakilnya yang dilakukan pada 9 Desember 2013. Dalam pilkada tersebut pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yang menjabat dari tahun 2016-2021. Pada pemerintahannya dibentuk beberapa kebijakan yang menunjang ekonomi dan sosial-budaya Kabupaten Pangandaran. Dengan potensi wisata yang besar, pemerintah Kabupaten Pangandaran mengatur pengelolaan kepariwisataan daerah salah satunya melalui ("Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025," 2018). Beberapa aspek yang menjadi tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, diantaranya pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri kepariwisataan, pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata. Dengan sasarannya yang disampaikan pada Bab IV Pasal 9 yakni:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
- b. Peningkatan lama tinggal wisatawan
- c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan
- d. Terwujudnya keseimbangan dan pengembangan kepariwisataan
- e. Pengembangan kepariwisataan melalui wisata pedesaan, agrowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam pedesaan dan pertanian

Hal tersebut diterapkan di berbagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), seperti Daerah Pangandaran, Cimerak, Kalipucang-Mangunjaya, Langkaplancar-Cigugur. Dalam perkembangan pariwisata daerah perlu perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya. Terlebih bagi Kabupaten Pangandaran pariwisata merupakan sektor penting untuk pembangunan daerah. Selain berperan sebagai penggerak ekonomi, pariwisata juga menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada tahun 2016 pendapatannya sebesar Rp.66.285.348,15 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.145.698,86.

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi, sosial-budaya masyarakat di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya sumber daya manusia yang mendukung akan hal tersebut. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga bisa menjadi suatu wadah untuk pengembangan budaya dan karakter. Dengan demikian, Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan terkait pendidikan karakter melalui ("Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran," 2017). Peraturan ini berpedoman kepada nilai keagamaan, kepramukaan, dan budaya lokal. Adanya multikulturalisme yang terbentuk di Kabupaten Pangandaran mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan didalamnya. Dalam nilai keagamaan meliputi program Ajengan Masuk Sekolah, Pangandaran Mengaji, dan Pendidikan Karakter Mulia (non-Islam). Hal ini disesuaikan dengan perbedaan agama yang terbentuk di Kabupaten Pangandaran. Dapat dilihat data statistik penduduk Kabupaten Pangandaran berdasarkan agama di tahun 2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 1

Data Penduduk Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Agama di tahun 2020

Agama	Jumlah Penduduk
Islam	242.751
Protestan	279
Katolik	55
Hindu	-
Budha	12
Lainya	2

Sumber: (Pangandaran, 2020)

Sedangkan dalam nilai budaya lokal, meliputi pengembangan sekolah pusat budaya (*cultural center school*), pengembangan budaya sunda, dan apresiasi seni budaya. Hal ini dikembangkan menjadi ekstrakurikuler seni dan budaya yang didalamnya menyinggung budaya lokal, kewirausahaan, pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal. Sekolah menjadi salah satu wadah untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Untuk apresiasi seni budaya setiap tanggal 25 diperingati sebagai hari budaya sunda dengan kewajiban untuk memakai pakaian adat yang ditentukan. Selain dalam sosial budaya, pemerintah juga menetapkan peraturan terkait ekstrakurikuler yang menunjang kepariwisataan berbasis kearifan lokal, diantaranya ekstrakurikuler bahasa inggris, kulineri, dan kerajinan. Adanya ekstrakurikuler tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan

kemandirian peserta didik dalam rangka mengusung tercapainya visi misi Kabupaten Pangandaran. Peraturan atau kebijakan tersebut dibuat untuk menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia maritim yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya pendidikan karakter dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki budi pekerti, sikap, dan perilaku positif yang tidak terpisahkan dengan lingkungannya. Dalam hal ini sesuai dengan cita-cita Kabupaten Pangandaran untuk membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan bisa menyokong Kabupaten Pangandaran yang lebih baik kedepannya, yang dapat memaksimalkan potensi wilayahnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Daerah Otonomi Baru, sudah cukup menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran mampu mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan Kabupaten Pangandaran yang meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2012-2023

Tahun	PDRB (juta rupiah)	Presentase Kenaikan
2012	5.984.684,64	-
2013	6.686.854,54	11,73%
2014	7.276.111,78	8,81%
2015	8.001.416,97	9,97%
2016	8.639.463,64	7,97%
2017	9.400.780,12	8,81%
2018	10.352.224,38	10,12%
2019	11.311.685,83	9,27%
2020	11.498.234,46	1,65%
2021	12.129.690,95	5,49%
2022	13.163.695,66	8,52%
2023	14.256.419,23	8,30%

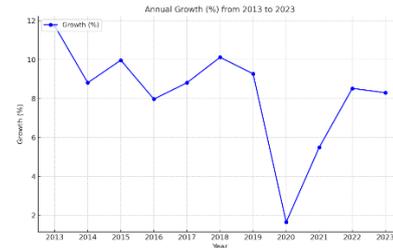
Sumber: (Pangandaran, 2017, 2022, 2024)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah nilai tambah bruto suatu barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik tertentu, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto ini dapat mencerminkan

pendapatan rata-rata di tahun tersebut, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tabel tersebut, PDRB Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan di setiap tahunnya dengan peningkatan yang tidak cukup besar, namun jika melihat presentase kenaikan dari tahun ke tahunnya cukup fluktuatif. Berikut presentase peningkatannya jika dibuat kedalam grafik.

Gambar 2

Grafik peningkatan PDRB Kabupaten Pangandaran



Sumber : (Dokumen pribadi penulis)

Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan ekonomi Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi. Cukup mengalami kenaikan di beberapa tahun, namun ada juga yang mengalami penurunan. Dengan hal ini bisa dilihat bahwa sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pangandaran belum melakukan pemanfaatan potensinya dengan cukup optimal. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian potensi kemaritiman masih perlu dijadikan perhatian untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran yang besar terutama dalam aspek sosio-budaya dan ekonomi, Kabupaten Pangandaran masih bisa mengembangkan dan mengelola potensinya dengan lebih maksimal untuk peningkatan perekonomian yang lebih signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah maritim yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi kemaritiman dalam aspek sosial-budaya ekonomi. Hal ini penting untuk disadari oleh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran berdiri untuk mengoptimalkan potensinya demi kepentingan bersama. Kabupaten Pangandaran memiliki pendapatan yang cukup meningkat di setiap tahunnya, namun hal ini masih harus diperhatikan, karena nampaknya pemanfaatan potensi ini belum

dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik melalui sumber daya manusia yang berkualitas serta kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk pengoptimalan potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih besar dari daratannya, dan kemaritiman sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat didalamnya. Dengan demikian, kajian tentang kemaritiman, wilayah maritim, potensi maritim sangat menarik untuk dikaji. Karena dengan hal tersebut dapat memberikan wawasan terkait kemaritiman, seperti dalam hal ini potensi maritim yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Artikel ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam*: Penerbit Ombak.
- Barat, B. P. P. D. J. (2016). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. *Bandung: Bappeda Pemprof Jabar*.
- Basri, D., M. Suryono. (2023). *Pengantar Ilmu Kemaritiman*. Bandung: Widiana Media Utama.
- Fauzi, P., Bakhri, S., & Abdul Aziz, A. (2019). Pembangunan Parawista di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 77-94.
- FIRDAUS, E. M. (2013). *PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT*. UIN SUNAN KALIJAGA,
- Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective*, 7(2), 164-179.
- Heriyawati, Y., Herdiani, E., & Dimiyati, I. S. (2020). Kearifan Lokal Hajat Laut Budaya Maritim Pangandaran. *Panggung*, 30(2), 518061.
- Muhammad, F. (2015). *Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
- Nugraha, A. S. (2017). *PERSEPSI DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN: Studi deskriptif di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia,
- Nuraini, A., Khadijah, U. L. S., & Radiah, S. (2023). Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi Hajat Laut pada Media E-Booklet dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Artefak*, 10(1), 29-42.
- Pangandaran, B. P. S. K. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran 2012-2016. Retrieved from <https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2017/08/07/3f98224a37830d6ac0680b8d/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-pangandaran-2012-2016.html>.
- Pangandaran, B. P. S. K. (2020). Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2020.

- Retrieved from <https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2020/04/27/3aa1afc640f74adeb926edd7/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2020.html>.
<https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2020/04/27/3aa1afc640f74adeb926edd7/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2020.html>
- Pangandaran, B. P. S. K. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Retrieved from <https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2022/04/05/ff35ac626fd63e74bb4a496b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html>.
<https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2022/04/05/ff35ac626fd63e74bb4a496b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html>.
- Pangandaran, B. P. S. K. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Retrieved from <https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2024/04/04/2c594f51c42cf652a29d3a21/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>.
<https://pangandarankab.bps.go.id/id/publikation/2024/04/04/2c594f51c42cf652a29d3a21/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39. A Tahun 2016 tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (2016).
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, (2017).
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025, (2018).
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, (2010).
- Putra, I. M., Irawan, F., Alifsyah, M., Effendy, M. R., Tanjung, R. N., & Patricia, V. L. T. (2022). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 15-34.
- Sahara, S. (2024). *PERKEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI PANGANDARAN 2006-2020*. Universitas Siliwangi,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (2009).
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran (2012).
- Wahyudin, Y. (2016). Potensi Bisnis Kelautan Di Negara Maritim Poros Dunia Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia (The Potency Of Marine Business In The Pivot Maritime Country Of The World Toward Indonesian People Welfare).
- Website Kabupaten Pangandaran. Retrieved from <https://portal.pangandarankab.go.id/>.